



KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI

http://kliping.dpr.go.id

Judul : PMP Dinilai Sudah Usang
Tanggal : Kamis, 29 November 2018
Surat Kabar : Republika
Halaman : 5

PMP Dinilai Sudah Usang

• GUMANTI AWALIYAH

Pengembalian PMP keliru secara filosofis.

JAKARTA — Wacana pemerintah mengembalikan mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP) dalam kurikulum di sekolah dinilai sebagai bentuk kemunduran. PMP yang menjadi mata pelajaran ‘pramadona’ di era Orde Baru dianggap usang dan sudah tak relevan dengan kondisi zaman.

Penulis buku Milenial Nusantara, Hasanuddin Ali, mengatakan, nilai-nilai luhur Pancasila penting untuk diajarkan kepada generasi saat ini. Namun, bukan berarti jawabannya adalah mengembalikan mata pelajaran PMP ke sekolah. Sebab, kata dia, karakter generasi saat ini berbeda jauh dengan generasi jaman dulu.

“Pendidikan Pancasila itu perlu untuk anak muda atau generasi

saat ini, tapi apakah bentuknya akan seperti PMP dulu (era Orde Baru) yang belajarnya hanya satu arah? Itu kurang cocok untuk generasi sekarang,” kata Ali kepada *Republika*, Rabu (28/11).

CEO Alvara Research Centre ini menyarankan, pemerintah atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) perlu menghadirkan bentuk lain yang kekinian dari pendidikan Pancasila yang sesuai dengan karakter generasi milenial. Yang terpenting, kata dia, nilai luhur Pancasila, seperti bermusuhan, menerima perbedaan, toleransi telah diterapkan dan dilatihkan kepada siswa di kelas.

“Jadi, jangan lagi hanya mengajarkan hafalan seperti PMP dulu, harus lebih pada pemberian contoh konkret Pancasila dan memanfaatkan media internet dan lain-lain,” ujar dia.

Kemendikbud saat ini sedang menggodok materi PMP untuk dijadikan mata pelajaran di kelas. Mendikbud Muhadjir Effendy mengatakan, saat ini PMP sedang dalam pengkajian dan perlu ada hal yang diperbaiki dari mata pelajaran itu.

Wakil Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Satriwan Salim, menilai, pengembalian PMP dalam kurikulum ataupun sebagai nama program keliru secara filosofis, pedagogis, sosiologis, dan akademis. “Yang dibutuhkan adalah aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam proses pembelajaran, iklim yang pancasailis di sekolah dan terpenting keteladanannya dari elite dan pemerintah,” kata dia.

Secara filosofis, lanjut Satriwan, sejatinya isi dari pelajaran PPKn, PKn, PMP adalah nilai-nilai karakter Pancasila itu sendiri. Bahkan, dalam Kurikulum 2013 yang kini digunakan pada tingkat pendidikan dasar dan menengah di Indonesia, nilai-nilai Pancasila menjadi intisarinya. Sederhananya, PMP adalah

mata pelajaran PPKn itu sendiri. Dengan kata lain, nilai-nilai moral Pancasila sudah masuk dalam PPKn pada semua jenjang sekolah, bahkan sampai pada perguruan tinggi. “Jadi, sangat aneh jika Kemendikbud ingin menghidupkan kembali PMP, membuat-buang tenaga, energi, dan pikiran,” ujar dia.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan, pelajaran PMP di masa lalu yang diinterpretasikan dengan sistem totalitari mengatakan penguasa selalu benar. Dia khawatir jika PMP dimunculkan, akan identik dengan interpretasi tersebut. Fahri menilai, rencana penghidupan PMP adalah bentuk kegagalan.

Dia menyarankan, pemerintah menggunakan pendekatan lain untuk mengajarkan kewarganegaraan, salah satunya melalui stasiun penyiaran untuk mengembangkan film tentang kewarganegaraan. “Itu yang harusnya dimasukkan di dalam pendidikan yang lebih masif, bukan kemudian mengambil mazhab dari pikiran lama yang diduga oleh orang cenderung memiliki nuansa totaliter, itu tidak boleh kita biarkan,” kata Fahri.

Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbud, Supriano, mengatakan, mata pelajaran PMP di era Orde Baru memang banyak menghafal. Sedangkan, saat ini rencananya akan langsung ke praktik pembelajaran.

“Ini lebih didorong ke praktik, bangsa ini kekurangan contoh jadi marilah kita perbanyak contoh perilaku sikap yang berkaitan dengan perbuatan Pancasila. Seperti gotong royong, musyawarah,” ujar dia.

Supriano mengatakan, Pendidikan Pancasila ini akan mulai diterapkan di satuan terkecil lembaga pendidikan, yakni setingkat TK. Namun, hingga kini formula dan metodologinya masih dikaji. ■ ed: mas alamil huda

si Guru'

pendidikan akan dibekali tiga nilai-nilai luhur Pancasila. Tujuannya, agar para guru siap mengajarkan IP yang rencananya akan kembali diajarkan di sekolah. “Guru ini kan yang kita ada hampir tiga juta guru. Todenya tidak perlu lagi menghafal, tapi melalui tugas-proyek, kegiatan kompok, itu yang kita akan sarkan kembali,” kata dia.

■ ed: mas alamil huda